

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Agust Suntoro dkk, 2020, *Pengkajian Komnas HAM RI Atas Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Komnas HAM RI, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Ketentuan – Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hadjon. M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jabbar Sabil, dkk, 2017, *Kerukunan Beragama dalam sistem sosial di Aceh*.
Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Nurul Akhmad, 2010, *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. ALPRIN,
Jawa Tengah.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung.
- Sushanty, Vera Rimbawani, 2020, *Hukum Perijinan*, UBHARA Press, Surabaya.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
– Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bagunan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun
2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum
kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 2/G/2019/PTUN BNA,
Tahun 2019.

C. Skripsi/Jurnal

Riko Firdaus, 2022 “Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah

(*Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Abdullah, 2020 "*Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Yadisar,A.M, 2020 "*Mekasnisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*", Skripsi, Universitas Kapuas Sintang.

Ismardi, 2011, *Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006*, Volume 3 Nomor 2.

Fuadi dkk, "*Problematic Legality Building Of Mosque Without Establishing Permit In Aceh*", *Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (April, 2021).

D. Internet

Komnas HAM RI Lakukan Mediasi Terkait Penghadangan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, Dialektis, Diakses pada tanggal 1 Juli 2023, <https://www.dialektis.com/aceh/komnas-ham-ri-lakukan-mediati-terkait-penghadangan-pendirian-masjid-muhammadiyah-Samalanga/>

Fuadi Mardatillah. *Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen*. Diakses melalui <https://waspadaaceh.com/sengkarut-pendirianmasjid-at-taqwa-di-samalanga-bireuen/>. Tanggal 10 Oktober 2023.

Sistem Informasi Kecamatan Samalanga. Diakses melalui https://kecsamalanga.sigapaceh.id/grafik/informasi_kependudukan pada tanggal 1 November 2023.

Notonagoro. *Hak dan kewajiban warga negara indonesia dengan uud 45*.Berita Media MKRI.Jakarta Selasa, 11 Agustus 2015. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>. 14 Oktober 2023